Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGAWI
JALAN AHMAD YANI No. 459 NGAWI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023 ini tidak lepas dari dukungan semua pihak untuk itu tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan demi tersusunnya rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Teriring doa semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi acuan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah khususnya maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi secara menyeluruh.

Ngawi, 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGAWI

KABUL TUNGGUL WINARNO,SIP
Pembina UtamaMuda
NIP. 197506071993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 LatarBelakang 1
1.2 LandasanHukum..... 4
1.3 Maksud danTujuan..... 9
1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah..... 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 52
2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah..... 53
2.5 Telaah Usulan Program dan kegiatan..... 68

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 80
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 80
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah... 81
3.3 Program dan Kegiatan 83

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 86
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 86

BAB V PENUTUP..... 120
5.1. Rencana Tindak Lanjut 120
5.2. Prediksi Rencana Kerja Perubahan 121

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR *139* TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah, terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* Kabupaten Ngawi Tahun 2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor *139* Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor *16* Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor *16*);
47. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 72);
48. Peraturan Bupati Ngawi Nomor *139* Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor *139*);
49. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR *139* TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor *139* Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 139) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada *Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa* Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada:

a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun Berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV : PENUTUP
e.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak terlepas dari RKPD yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD, demikian juga Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan kata lain bahwa Renja, RKPD, Renstra dan RPJMD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya disusun secara beriringan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Maka ketika timbul dinamika kebijakan terutama kebijakan anggaran yang mengharuskan adanya perubahan maka RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga harus disesuaikan seiring dengan adanya perubahan–perubahan tersebut.

Penetapan dokumen perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa

kondisi sebelum dan sesudah ditetapkan sehingga selaras dengan perkembangan zaman. Perlunya dilakukan perubahan pada dokumen karena adanya penyesuaian Skala Prioritas Daerah dan Skala prioritas Perangkat Daerah serta dinamika kebijakan keuangan tahun 2023 baik dari pusat maupun daerah.

Dalam proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada rancangan awal renja Tahun 2023 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan sampai dengan tribulan 2 (dua) atau semester pertama. Renja Perubahan Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA maupun DPA Perubahan Tahun 2023 sebagai tindaklanjut adanya dinamika sebagaimana diuraikan diatas.

Penyusunan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah tersebut berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II yang dilandasi dasar Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (a) Pergeseran anggaran dikarenakan adanya penyesuaian Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah (b) Penyesuaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan demikian mengacu Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaaan, meliputi (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonmi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), maka faktor pendukung adanya perubahan RKPD Kabupaten Ngawi

tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kesesuaian pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah, program dan rencana kegiatan RKPD terkait;

1. Efisiensi penggunaan anggaran dengan melibatkan perencanaan anggaran pada tahun berjalan pada elebihan anggaran tahun sebelumnya;
2. Kebijakan alokasi dana bagi hasil bagi tembakau nasional pada tahun 2023;
3. Kebijakan pada pagu definitif bantuan keuangan ketahanan pangan nabati dan hewani di Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting ; dan
4. Kebijakan pagu anggaran definitif belanja bantuan keuangan khusus bidang kesehatan.

1.1 Landasan Hukum :

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E):
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 89 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
46. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21).
47. Perubahan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomo 119);
48. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
49. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 72);

50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kinerja dalam proses revisi APBD 2023, dan sebagai dasar prioritas pembangunan APBD perubahan tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023 menjadi pedoman untuk :

1. Kebijakan umum perubahan APBD (KUPA), penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (P-PPAS), dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD);
2. Mengubah sub kegiatan, menghapus sub kegiatan, menambah sub kegiatan baru, menambah atau mengurangi target kinerja, serta mengubah alokasi dan kelompok sasaran berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023.
3. Penyesuaian dan pergeseran Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BK Prov)
4. Pergeseran anggaran dikarenakan adanya penyesuaian Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah.

Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan Tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan meningkatkan

kemandirian desa di Kabupaten Ngawi pada tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan Rancangan PAPBD. dijelaskan juga alasan yang mendasariperlunya dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah, misalnya sebagai berikut:

1. Penyesuaian Dana Transfer DBHCHT dan/atau penambahan sub kegiatan bersumber dana DBHCHT
2. Penyesuaian dana Transfer DAK dan/atau penambahan subkegiatan bersumber dari dana DAK
3. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa timur kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
4. PMK 212 (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PUPR, Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup

5. Pergeseran angaaran dokarenakan adanya penyesuaian Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah
6. Penyesuaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
7. adanya penambahan Sub Kegiatan baru yang bersifat urgen/ penting/mmendesak

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Perubahan renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini adalah Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang meuat antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian IKU Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dan pendanaannya dengan pedoman sebagai berikut:
    1. Dasar pendanaan Perangkat Daerah dalam Rancangan Renja Tahun 2023 adalahPerubahan Atas Kedua atas APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
    2. Perangkat Daerah diharapkan telah mengakomodir sub kegiatan baru (Jika Ada) yang sedang dalam proses pengusulan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan, antara lain meliputi :
    1. Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan;
    2. Target indikator program,kegiatan, dan sub kegiatan yang mengalami perubahan;
    3. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan sub kegiatan jika terdapat perubahan lokasi;
    4. Total pagu indikatif sebelum perubahan dan sesudah perubahan yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Tabel program/kegiatan/subkegiatan yang digunakan dicetak dari aplikasi SIPD dengan alamat *ngawikab. SIPD.kemendagri.go.id.*

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana Tindak lanjut;
d. pada bagian lembar terakhir disediakan tempat untuk tanda tangan Kepala Daerah, karena Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah akan menjadi lampiran dari Rancangan Perkada tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKEANAAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan dengan tahapan meliputi penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Forum OPD), perumusan rancangan akhir Renja, dan penetapan Renja. Artinya, Penyusunan Renja harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Rentra dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah Pusat.

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 telah dilaksanakan sampai dengan tribulan 2 tahun berkenaan. Sejalan dengan perkembangannya Renja Tahun 2023 mengalami perubahan baik dari sisi pagu anggaran maupun target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. berdasarkan KUAPPAS tahun anggaran 2023 dengan pagu indikatif. Renja Perubahan Tahun 2023 dilakukan karena adanya perubahan pagu yang berdampak pada pelaksanan kegiatan karena adanya penyesuaian skala prioritas daerah dan skala prioritas Perangkat Daerah serta dinamika kebijakan keuangan tahun 2023 baik dari pusat maupun daerah. Selain itu untuk kegiatan yang bersifat mandataris seperti Honorarium Kader Posyandu, Honorarium RT/RW dan BPJS, Honorarium aparatur Desa, Bantuan Keuangan Provinsi (BKProv) tetap mendapat prioritas anggaran yang sebelumnya masih ada kekurangan, kekurangannya dipenuhi pada pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023. Khusus

untuk Honorarium RT/ RW kekurangan anggarannya akan dipenuhi melalui Dinas Kesehatan sehingga realisasi yang dilakukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya 4 bulan saja.

Oleh karena pelaksanaan kegiatan tahun 2023 mengalami pelambatan maka hal ini berpengaruh pada pencapaian kinerja sampai dengan semester 1 (satu) Adapun hasil pelaksanaan renja sampai dengan tribulan2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan. Secara umum realisasi sampai dengan tribulan 2 memang masih sangat rendah hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan yg molor sehingga tidak sesuai jadwal karena adanya penyesuaian penyesuaian namun demikian tetap diupayakan untuk pencapaian target sampai akhir tahun dapat direalisasikan kecuali yang memang tidak bisa dilaksanakan seperti event pameran produk unggulan, adanya pemberian hibah barang yang di tiadakan termasuk bantuan modal usaha bagi rumah tangga miskin. Tetapi pembinaan, sosialisasi program dan kegiatan terkait dengan urusan tetap dilaksanakan melalui media online.

2.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun target target yang telah memenuhi kinerja adalah yang berkaitan dengan kegiatan rutin seperti pembayaran gaji dan TPP ASN, pembayaran rek listrik, air dan internet serta pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kerja.

2.3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan. Sedangkan realisasi yang melebihi target kinerja ada beberapa terkait dengan pemenuhan dokumen yang semula targetnya nol tetapi dokumen tetap harus tersedia seperti : (laporan kinerja yang anggarannya direfocusing hingga di drop sama sekali namun pemenuhan dokumen tetap dilaksanakan)

2.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. sebagaimana telah dijelaskan diatas baik yang tidak memenuhi target, yang

memenuhi maupun yang melebihi target telah diuraikan dengan jelas.

2.5. Implikasi yang timbul terhadap capaian kinerja, secara umum implikasi terhadap capaian kinerja memang masih sangat rendah sekali, namun demikian tetap diupayakan dapat tercapai di akhir tahun tentu saja dengan menggunakan pola baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan yang ada seperti pemanfaatan media online atau teknologi digital.

2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diperlukan kecermatan dalam menyusun rencana kegiatan maupun penganggarannya. Rencana aksi kegiatan harus sejalan dengan penyerapan anggaran agar pencapaian kinerja lebih efisien dan efektif.

Adapun matriks evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Triwulan II periode pelaksanaan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Triwulan II Periode Pelaksanaan Tahun 2023

No	Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
													I		II		III		IV											
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100		16	17
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0				NON URUSAN																									
	0	0			NON URUSAN																									
1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																									
	0	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
	0	0	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9,00	Dokumen	17.920.000	0	0	9,00	17.920.000	5,00	11.420.000	1,00	0	0	0	0	0	6,00	11.420.000	66,67	64	6,00	11.420.000	66,67	63,73	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

						Jumlah Dokumen Penganggaran OPD yang disusun	4,00	Dokumen	17.920.000	0		4,00		4,00		0		0		0		4,00		100,00		4,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	2.044.000	0	0	1,00	2.044.000	1,00	2.044.000	0	0	0	0	0	0	1,00	2.044.000	100,00	100	1,00	2.044.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1.500.000	0	0	1,00	1.500.000	0	0	1,00	0	0	0	0	0	1,00	0	100,00	0	1,00	0	100	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2,00	Dokumen	2.500.000	0	0	2,00	2.500.000	2,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2,00	2.500.000	100,00	100	2,00	2.500.000	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	2,00	Dokumen	1.500.000	0	0	2,00	1.500.000	1,00	0	1,00	558	0	0	0	0	2,00	558	100,00	37	2,00	558.000	100	37,20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						dokumen perubahan DPA-SKPD																							
	0	0	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD yang disusun	7,00	Dokumen	4.550.000	0	0	7,00	4.550.000	1,00	0	3,00	0	0	0	0	0	4,00	0	57,14	0	4,00	0	57,14	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																								
	0	0	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	29,00	Dokumen	3.856.258.822	0	0	29,00	3.856.258.822	3,00	445.133.775	12,00	1.355.327.786	0	0	0	0	15,00	1.800.461.561	51,72	47	15,00	1.800.461.561	51,72	46,69	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	924,00	Orang/Bulan	3.856.258.822	0		924,00		98,00		384,00		0		0		482,00		52,16		482,00		52,16		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2,00	Laporan	2.500.000	0	0	2,00	2.500.000	2,00	0	0	1.395.000	0	0	0	0	2,00	1.395.000	100,00	56	2,00	1.395.000	100	55,80	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan	50,00	Laporan	2.500.000	0	0	50,00	2.500.000	12,00	0	13,00	0	0	0	0	0	25,00	0	50,00	0	25,00	0	50	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

					mesteran SKPD	laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD																							DESA
	0	0	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
	0	0	1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1,00	Paket	8.500.000	0	0	1,00	8.500.000	1,00	7.095.000	0	0	0	0	0	0	1,00	7.095.000	100,00	83	1,00	7.095.000	100	83,47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta/orang yang mengikuti sosialisasi	35,00	Orang	150.000.000	0	0	35,00	150.000.000	35,00	147.385.800	0	0	0	0	0	0	35,00	147.385.800	100,00	98	35,00	147.385.800	100	98,26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
	0	0	1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4,00	Paket	18.217.450	0	0	4,00	18.217.450	3,00	14.951.595	0	0	0	0	0	0	3,00	14.951.595	75,00	82	3,00	14.951.595	75	82,07	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	0	0	1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1,00	Paket	57.401.590	0	0	1,00	57.401.590	0	17.711.000	1,00	14.530.000	0	0	0	0	1,00	32.241.000	100,00	56	1,00	32.241.000	100	56,17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0	0	1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4,00	Paket	13.354.200	0	0	4,00	13.354.200	0	0	2,00	3.330.000	0	0	0	0	2,00	3.330.000	50,00	25	2,00	3.330.000	50	24,94	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2,00	Paket	28.069.000	0	0	2,00	28.069.000	1,00	4.000.000	0	3.240.000	0	0	0	0	1,00	7.240.000	50,00	26	1,00	7.240.000	50	25,79	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10,00	Dokumen	17.400.000	0	0	10,00	17.400.000	0	0	6,00	3.935.000	0	0	0	0	6,00	3.935.000	60,00	23	6,00	3.935.000	60	22,61	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40,00	Laporan	297.143.000	0	0	40,00	297.143.000	3,00	24.668.500	13,00	52.935.000	0	0	0	0	16,00	77.603.500	40,00	26	16,00	77.603.500	40	26,12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									
0	0	1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4,00	Unit	26.944.813	0	0	4,00	26.944.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0	0	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
0	0	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah iklan/publikasi media cetak dan elektronik	100	Kali	125.387.300	0	0	100	125.387.300	25,00	31.054.702	25,00	27.884.267	0	0	0	0	50,00	58.938.969	50,00	47	50,00	58.938.969	50	47,01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	36,00	Laporan	125.387.300	0		36,00		9,00		9,00		0		0		18,00		50,00		18,00		50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
0	0	1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24,00	Laporan	79.200.000	0	0	24,00	79.200.000	4,00	13.200.000	6,00	19.800.000	0	0	0	0	10,00	33.000.000	41,67	42	10,00	33.000.000	41,67	41,67	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
0	0	1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	32,00	Laporan	96.440.000	0	0	32,00	96.440.000	5,00	16.760.000	9,00	23.094.000	0	0	0	0	14,00	39.854.000	43,75	41	14,00	39.854.000	43,75	41,33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
0	0	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										

0	0	1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6,00	Unit	13.500.000	0	0	6,00	13.500.000	1,00	3.843.980	3,00	3.350.600	0	0	0	0	4,00	7.194.580	66,67	53	4,00	7.194.580	66,67	53,29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13,00	Unit	16.900.000	0	0	13,00	16.900.000	0	0	6,00	2.450.000	0	0	0	0	6,00	2.450.000	46,15	14	6,00	2.450.000	46,15	14,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12,00	Unit	24.470.000	0	0	12,00	24.470.000	3,00	6.735.000	3,00	4.800.000	0	0	0	0	6,00	11.535.000	50,00	47	6,00	11.535.000	50	47,14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
0	0	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2,00	Unit	40.000.000	0	0	2,00	40.000.000	1,00	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1,00	20.000.000	50,00	50	1,00	20.000.000	50	50,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							66,1	53,23			66,1	53,23	
Predikat Kinerja																							Sedang	Rendah			Sedang	Rendah	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK																									

					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																									
2	2	13	2		PROGRAM PENATAAN DESA																									
	2	13	2	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa																									
	2	13	2	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Dokumen RKPDes dan RPJMDes yang tersusun tepat waktu	0	Dokumen	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	3.025.000	0	0	0	0	0	3.025.000	0,00	12	0	3.025.000	0	12,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi penyusunan RKPDes dan RPJMDes	0	Orang	25.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	10,00	Desa	25.000.000	0		10,00		0		7,00		0		0		7,00		70,00		7,00		70		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	2	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	jumlah peserta sosialisasi sarpras desa	0	Orang	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	36.057.000	0	44.073.000	0	0	0	0	0	80.130.000	0,00	40	0	80.130.000	0	40,07	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						jumlah peserta sosialisasi sarpras desa	0	Desa	200.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah aparatur pemerintahan desa yang suah mengikuti pelatihan perencanaan	0	Desa	200.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen fasilitasi sarpras desa	1,00	Dokumen	200.000.000	0		1,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	213,00	Desa	200.000.000	0		213,00		21,00		182,00		0		0		203,00		95,31		203,00		95,31		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								20,66	26,08			20,66	26,08		
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3	2	13	3		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA																										
	2	13	3	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa																										

	2	13	3	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama antar desa	0	Desa	202.410.000	0	0	0	202.410.000	0	8.892.500	0	16.005.000	0	0	0	0	0	24.897.500	0,00	12	0	24.897.500	0	12,30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta sosialisasi kerjasama antar desa	0	Orang	202.410.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten /kota	5,00	Dokumen	202.410.000	0		5,00		0		2,00		0		0		2,00		40,00		2,00		40		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	3	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama desa dengan pihak ketiga.	0	Desa	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta rapat kerjasama desa dengan pihak ketiga	0	Orang	5.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten /Kota	5,00	Dokumen	5.000.000	0		5,00		0		5,00		0		0		5,00		100,00		5,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	13	3	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah usulan Kawasan Perdesaan	0	Usulan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta rapat koordinasi kawasan perdesaan	0	Orang	15.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah desa yang terfasilitasi melakukan pembangunan kawasan pedesaan	0	Desa	15.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	2,00	Dokumen	15.000.000	0		2,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								14	12,3			14	12,3	
Predikat Kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	2	13	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																									
	2	13	4	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintaha																									

					n Desa																									
	2	13	4	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaran administrasi pemerintahan desa	213,00	Desa	27.732.000	0	0	213,00	27.732.000	0	6.705.000	0	0	0	0	0	0	0	6.705.000	0,00	24	0	6.705.000	0	24,18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	0	Desa	27.732.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah desa yang dimonitoring evaluasi	25,00	Desa	27.732.000	0		25,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan RKPDes dan APBDes	213,00	Desa	27.732.000	0		213,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumllah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	2,00	Dokumen	27.732.000	0		2,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencana	2,00	Dokumen	22.830.000	0	0	2,00	22.830.000	0	0	2,00	9.600.000	0	0	0	0	2,00	9.600.000	100,00	42	2,00	9.600.000	100	42,05	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

						an Pembangunan Desa																							DESA
						monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	20,00	Desa	22.830.000	0		20,00		0		20,00		0		0		20,00		100,00		20,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah peserta sosialiasi pengelolaan keuangan desa	213,00	Orang	320.485.500	0	0	213,00	320.485.500	213,00	65.156.500	0	43.593.000	0	0	0	0	213,00	108.749.500	100,00	34	213,00	108.749.500	100	33,93	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah fasilitasi pengeolaan keuangan desa	0	Orang	320.485.500	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						juknis pengelolaan Dana Desa/DD	1,00	Desa	320.485.500	0		1,00		1,00		0		0		0		1,00		100,00		1,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Moitoring Evaluasi	30,00	Orang	320.485.500	0		30,00		30,00		0		0		0		30,00		100,00		30,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan	0	Dokumen	320.485.500	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYA

						keuangan desa																								RAKAT DAN DESA
	2	13	4	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemdes yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	213,00	Orang	4.466.019.000	0	0	213,00	4.466.019.000	213,00	822.971.012	0	621.190.000	0	0	0	0	213,00	1.444.161.012	100,00	32	213,00	1.444.161.012	100	32,34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah fasilitasi pembayaran iuran BPJS Perangkat desa (2255 x 12)	31.872,00	Kali	4.466.019.000	0		31.872,00		7.016,00		7,1		0		0		14.116,00		44,29		14.116,00		44,29		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan da pelatihan	0	Orang	4.466.019.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						persentase permasalahan desa yang terselesaikan	0	%	4.466.019.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMdesa dan Lembaga Kerjasama antar desa	1,00	Dokumen	40.212.000	0	0	1,00	40.212.000	1,00	6.640.000	0	8.562.000	0	0	0	0	1,00	15.202.000	100,00	38	1,00	15.202.000	100	37,80	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkata	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksana	0	Desa	358.000.000	0	0	0	358.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN

					n dan Pemberhentian Kepala Desa	an pemilihan, pengangkatan,pemberhentian kepala desa																							MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Kepala Desa yang dilantik	17,00	Orang	358.000.000	0		17,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	17,00	Laporan	358.000.000	0		17,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terfasilitasi pengisian perangkat desanya	20,00	Orang	36.020.000	0	0	20,00	36.020.000	0	24.997.200	10,00	0	0	0	0	0	10,00	24.997.200	50,00	69	10,00	24.997.200	50	69,40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah desa yang terfasilitasi pengisian perangkat desanya	0	Desa	36.020.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Monitoring Evaluasi pengisian perangkat desa	20,00	Desa	36.020.000	0		20,00		0		10,00		0		0		10,00		50,00		10,00		50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						jumlah laporan fasilitasi pengagkatan dan pemberhentian perangkat desa	20,00	Laporan	36.020.000	0		20,00		0		10,00		0		0		10,00		50,00		10,00		50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang update data profil desa setiap 6 bulan	0	Desa	23.215.000	0	0	0	23.215.000	0	11.880.000	0	0	0	0	0	0	0	11.880.000	0,00	51	0	11.880.000	0	51,17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah aparatur pemdesa yang dibimtek profil desa	213,00	Orang	23.215.000	0		213,00		213,00		0		0		0		213,00		100,00		213,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1,00	Dokumen	23.215.000	0		1,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Desa yang terfasilitasi IDM	213,00	Desa	23.215.000	0		213,00		213,00		0		0		0		213,00		100,00		213,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	0	Desa	24.835.000	0	0	0	24.835.000	0	0	0	6.575.000	0	0	0	0	0	6.575.000	0,00	26	0	6.575.000	0	26,47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah peserta yang mendapatk	0	Orang	24.835.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN

						an pembinaan pengelolaan aset																							MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengelolaan aset desa	213,00	Orang	24.835.000	0		213,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2,00	Dokumen	24.835.000	0		2,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						monitoring dan evaluasi perkembangan administrasi aset desa	10,00	Desa	24.835.000	0		10,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan/pelatihan manajemen pemerintahan desa	213,00	Orang	27.266.500	0	0	213,00	27.266.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyusun laporan Kepala Desa	15,00	Desa	76.875.000	0	0	15,00	76.875.000	0	0	15,00	75.417.500	0	0	0	0	15,00	75.417.500	100,00	98	15,00	75.417.500	100	98,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala	15,00	Laporan	76.875.000	0		15,00		0		15,00		0		0		15,00		100,00		15,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

						Desa																								DESA
						jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan laporan kepala desa	15,00	Orang	76.875.000	0		15,00		0		15,00		0		0		15,00		100,00		15,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	4	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta bimtek Evaluasi perkembangan Desa	213,00	Orang	52.155.000	0	0	213,00	52.155.000	213,00	13.878.000	0	38.235.000	0	0	0	0	213,00	52.113.000	100,00	100	213,00	52.113.000	100	99,92	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah desa yang dievaluasi lomba desa	19,00	Desa	52.155.000	0		19,00		19,00		0		0		0		19,00		100,00		19,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah pemenang lomba desa TK.kabupaten, dan difasilitasi ke tingkat yg lebih tinggi	1,00	Pemenang	52.155.000	0		1,00		0		1,00		0		0		1,00		100,00		1,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3,00	Dokumen	52.155.000	0		3,00		0		3,00		0		0		3,00		100,00		3,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								43,76	51,54			43,76	51,54	
Predikat Kinerja																								Sangat	Rend			Sangat	Rendah	

																							Rendah	ah			Rendah				
5	2	13	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																										
	2	13	5	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																										
	2	13	5	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan lembaga Adat desa	1,00	LAD	60.000.000	0	0	1,00	60.000.000	0	1.395.000	0	56.533.000	0	0	0	0	0	57.928.000	0,00	97	0	57.928.000	0	96,55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

					Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																								
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Lembaga Adat Desa	50,00	Orang	60.000.000	0		50,00		0		50,00		0		0		50,00		100,00		50,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah lembaga adat yg dibina	2,00	LAD	60.000.000	0		2,00		0		1,00		0		0		1,00		50,00		1,00		50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah dokumen hasil Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	2,00	Dokumen	60.000.000	0		2,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah LPMD/LKD yang mengikuti pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan desa	0	Orang	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	1.860.000	0	1.716.000	0	0	0	0	0	3.576.000	0,00	18	0	3.576.000	0	17,88	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

					Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																							
						Jumlah LKD yang dibina	57,00	Orang	20.000.000	0		57,00		19,00		19,00		0		0		38,00		66,67		38,00		66,67		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah pemenang LPMD/LKD yang difasilitasi ketingkat yang lebih tingg (jumlah LPM berprestasi)	0	Pemenang	20.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah RT/RW yg mengikuti sosialisasi perencannaan pembangunan partisipatif	0	RT/RW	20.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah fasilitasi penerimaan honorarium RT / RW	81.924,00	Kali	20.000.000	0		81.924,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah KPMD yang megikuti pelatihan perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa	0	Orang	20.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Jumlah KPMD yang dibina	0	Orang	20.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah pokjanal posyandu yang mendapat pembinaan dan pelatihan	19,00	Pokjanal /Pokja	20.000.000	0		19,00		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah LKD yang mengikuti pelatihan	60,00	Orang	20.000.000	0		60,00		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah RTM yang dilatih ketrampilan usaha ekonomi	30,00	RTM	35.000.000	0	0	30,00	35.000.000	0	0	0	4.495.000	0	0	0	0	0	4.495.000	0,00	13	0	4.495.000	0	12,84	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah RTM penerima manfaat yang dibina	86,00	RTM	35.000.000	0		86,00		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah RTM yang menerima bantuan Modal Usaha	86,00	RTM	35.000.000	0		86,00		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Jumlah dokumen fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	0	Dokumen	35.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah wartek dan posyantek yang dibina	5,00	Wartek	55.000.000	0	0	5,00	55.000.000	0	0	5,00	49.145.250	0	0	0	0	5,00	49.145.250	100,00	89	5,00	49.145.250	100	89,36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah bantuan hibah barang TTG yang disalurkan	0	Unit	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah event TTG yang dilaksanakan tk. Nasional (lombaTTG, Inovasi TTG, gelar TTG dll)	1,00	Event	55.000.000	0		1,00		0		1,00		0		0		1,00		100,00		1,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah peserta mengikuti studybanding tentang TTG	0	Orang	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah bantuan hibah barang SDA yang disalurkan	0	Unit	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Jumlah Pemanfaat SDA yang dibina	0	RT	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah event TTG yang dilaksanakan tingkat kabupaten (lombaTTG, Inovasi TTG, gelar TTG dll)	0	Event	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Desa yang dibina	0	Desa	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah laporan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	0	Laporan	55.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang menyelenggarakan BBGRM	0	Desa	516.000.000	0	0	0	516.000.000	0	15.080.000	0	104.513.000	0	0	0	0	0	119.593.000	0,00	23	0	119.593.000	0	23,18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah event BBGRM yang diselenggarakan	2,00	Event	516.000.000	0		2,00		0		1,00		0		0		1,00		50,00		1,00		50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Jumlah pemenang lomba gotong royong terbaik	0	Pemenang	516.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah sambang desa yang diselenggarakan	19,00	Desa	516.000.000	0		19,00		0		1,00		0		0		1,00		5,26		1,00		5,26		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3,00	Laporan	516.000.000	0		3,00		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	5	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/ sosialisasi /pembinaan 10 program pokok PKK	900	Orang	384.100.000	0	0	900	384.100.000	100	22.034.500	200	148.092.000	0	0	0	0	300	170.126.500	33,33	44	300	170.126.500	33,33	44,29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah pemenang lomba PKK yg difasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi	1,00	Pemenang	384.100.000	0		1,00		0		1,00		0		0		1,00		100,00		1,00		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah pemenang lomba jambore PKK	0	Pemenang	384.100.000	0		0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Jumlah program kerja TP PKK Kab yang terintegrasi dengan OPD	0	Program	384.100.000	0		0		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Pnggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,00	Dokumen	384.100.000	0		1,00		0		0		0		0		0,00		0		0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						16,81	47,35			16,81	47,35		
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																						32,27	38,1			32,27	38,1		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : -

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya : -

Tindak Lanjut Yang Di Perlukan Dalam Renja PD Berikutnya : -

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang dijabarkan melalui RKPD. Renja perubahan tahun 2023 dilaksanakan untuk lebih fokus pada Skala Prioritas Daerah dan Skala Prioritas Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam hal ini penyusunan perubahan Renja 2023 Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Hal ini sudah ditetapkan dengan KUAPPAS Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 10.475.065.130 dan telah mengalami perubahan atas 1 menjadi Rp. 10.393.305.175 kemudian perubahan atas 2 menjadi Rp. 11.897.355.175 ini berarti pada Renja Perubahan ini Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami kenaikan pada perubahan pertama karena terdapat penambahan pagu gaji yang mengalami kenaikan karena adanya mutasi masuk pegawai, dan pada beberapa sub kegiatan karena menjadi skala prioritas. Dengan demikian secara subtantif dapat berpengaruh pada pencapaian target kinerja tahun 2023 sampai dengan semester 2 bulan Juni yang belum tercapai akan dievalusi agar tetap tercapai di akhir tahun.

Sedangkan daftar program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.1 dibawah ini.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu Misi ke-2 adalah “Mengembangkan Perekonomian Kerakyatan Melalui Kemudahan Investasi,Pariwisata Berbasis Potensi Lokal dan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan didukung Riset dan tekhnologi”. Dalam mendukung visi misi tersebut telah dijabarkan kedalam program

kegiatan dan sub kegiatan setelah adanya penyelerasan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 yaitu terdiri 5 Program,9 indikator program, 38 Indikator kegiatan 11 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan.

Tabel. 3.1
Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

A. Non Urusan

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan pemerintahan	1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6	Evaluasi kinerja perangkat daerah
		2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				18	Fasilitasi kunjungan tamu
				19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		6	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				22	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

				23	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				25	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
				26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
1	Penataan Desa	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
				2.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	3	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
				4	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				5	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				10	Pembinaan Pemberdayaan BUM DESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
				11	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				12	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				13	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
				14	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				15	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	Program Pemberdayaan Lembaga	4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	19	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

	Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				21	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				22	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				23	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				24	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada pelaksanaan tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Ngawi

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula (Renja 2023)	Menjadi (Perubahan Renja 2023)	Renja 2023	APBD 2023	Perubahan Renja 2023			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**10.475.065.130**	**10.393.305.175**	**11.897.355.175**							**14.660.037.234**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun	%		%	100 %		**5.465.322.730**	**4.904.200.175**	**4.904.200.175**		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	DPMDesa	100 %	**6.445.037.234**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD Yang di susun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**26.500.000**	**30.014.000**	**30.014.000**		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		100 %	**73.000.000**	
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	12.000.000	17.920.000	17.920.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	9 Dokumen	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	2.044.000	2.044.000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	1 Dokumen	4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	2 Dokumen	7.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	,	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	2 Dokumen	7.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja OPD yang disusun				7 Dokume n	7 Dokumen	8.500.000	4.550.000	4.550.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	7 Dokumen	5.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	**13**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**4.570.635.751**	**3.861.258.822**	**3.861.258.822**						100 %	**4.621.291.734**	
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan non ASN yang di susun				29 Dokume	n 29 Dokume	n 4,565,635,751	3.856.258.822	3.856.258.822		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPMDesa	29 Dokume	n 4,616,291,734	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang di susun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan 2 Laporan	1 laporan 2 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	1 laporan 2 Laporan	2.500.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Sem SKPD	an poran aporan esteran			50 Laporan	50 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	50 Laporan	2.500.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	**13**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang di sediakan	%		%	100 %	100 %	**113.500.000**	**158.500.000**	**158.500.000**						100 %	**920.000.000**	

2	13	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.500.000	8.500.000	8.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	1 Paket	20.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	100.000.000	150.000.000	150.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	35 Orang	600.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek				7 Orang 50 orang	7 Orang 50 orang	5.000.000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	7 Orang 50 orang	300.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	**13**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang sediakan	%		%	100 %	100 %	**288.274.240**	**431.585.240**	**431.585.240**						100 %	**275.000.000**	
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.217.450	18.217.450	18.217.450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	4 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

2	13	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.826.590	57.401.590	57.401.590	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	1 Paket	55.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.514.200	13.354.200	13.354.200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	4 Paket	70.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.414.000	28.069.000	28.069.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	2 Paket	70.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokume	n 10 Dokume	n 21,000,000	17.400.000	17.400.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	10 Dokume	n 5,000,000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	179.302.000	297.143.000	297.143.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	40 Laporan	70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di sediakan	%		%	100 %	100 %	**25.147.439**	**26.944.813**	**26.944.813**						100 %	**100.000.000**	
2	13	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan perlengkapan kantor yang Diadakan				4 Unit	4 Unit	25.147.439	26.944.813	26.944.813		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	4 Unit	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang di sediakan	%		%	100 %	100 %	**332.745.300**	**301.027.300**	**301.027.300**						100 %	**303.000.000**	
2	13	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di kirim				100 surat	100 surat	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	100 surat	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Iklan / Publikasi media cetak dan elektronik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 kali 24 laporan	100 kali 24 laporan	145.807.300	125.387.300	125.387.300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	100 kali 24 laporan	98.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 laporan	48 laporan	99.000.000	79.200.000	79.200.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	48 laporan	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 laporan	72 laporan	87.938.000	96.440.000	96.440.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	72 laporan	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan	%		%	100 %	100 %	**108.520.000**	**94.870.000**	**94.870.000**						100 %	**152.745.500**	

2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23.500.000	13.500.000	13.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	1 Unit	40.610.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	16.900.000	16.900.000	16.900.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	13 Unit	26.375.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 unit	2 unit	28.120.000	24.470.000	24.470.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	2 unit	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	DPMDesa	2 unit	75.760.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase jalan Desa yang terhubung dengan desa yang lain	%		%	40 %	40 %	**170.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**						40 %	**150.000.000**	
2	**13**	**02**	2,01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi / pembinaan sarpras desa	%		%	100 %	100 %	**170.000.000**	**225.000.000**	**225.000.000**						100 %	**150.000.000**	

2	13	02	2,01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				10 Desa	10 Desa	30.000.000	25.000.000	25.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa	10 Desa	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi Sarpras Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 dokumen 180 desa	1 dokumen 213 desa	140.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa	1 dokumen 213 desa	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah peningkatan Kerjasama Antar Desa Jumlah Peningkatan Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga	Kerjasama Kerjasama		Kerjasama Kerjasama	26 Kerjasama 5 kerjasama	26 Kerjasama 5 kerjasama	**230.000.000**	**212.410.000**	**222.410.000**						26 Kerjasama 5 kerjasama	**400.000.000**	
2	**13**	**03**	2,01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Jumlah Kerjasama Antar Desa Jumlah Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga Jumlah Usulan Kawasan Perdesaan yang di tindak lanjuti persentase peningkatan kerjasama desa Persentase Kerjasama desa dengan pihak ketiga	Kerjasama kawasan % %		Kerjasama Kerjasama kawasan % %	5 Kerjasama 5 Kerjasama 2 kawasan 0,63% 100%	5 Kerjasama 5 Kerjasama 2 kawasan	**230.000.000**	**212.410.000**	**222.410.000**	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	**Kab. Ngawi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan**		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		5 Kerjasama 5 Kerjasama 2 kawasan 0,76% 100%	**400.000.000**	

2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000	202.410.000	202.410.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDESma	5 Dokumen	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDESma	5 Dokumen	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	5.000.000	15.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi UmumBantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDESma	2 Dokumen	280.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase BUMDes yang meningkat statusnya dari berkembang menjadi maju Persentase Desa yang menerapkan standart pelayanan minimal desa(SPM Desa) persentase peningkatan status desa mandiri Persentase desa yang pemerintahan desanya memiliki tata kelola yang baik	% % % %		% % % %		0,0046 % 4.69 % 4.69 % 35%	**3.549.742.400**	**3.996.595.000**	**5.475.645.000**		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		0,0046 % 4.69 % 4.69 % 38%	**5.175.000.000**	
2	**13**	**04**	2,01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah kelembagaan desa (pemdes dan BPD) yang ditata sesuai standar Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa (pemdes dan BPD) yang ditata sesuai standar Persentase BUMDes yang meningkatdari berkembang menjadi maju Persentase desa yang sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa	lembaga admin orang % % % % % % %		lembaga admin orang % % % % %	14 lembaga 189 admin 1278 orang 100 % 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 %	14 lembaga 189 admin 1278 orang 100 % 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 %	**3.549.742.400**	**3.996.595.000**	**5.475.645.000**		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				14 lembaga 189 admin 1278 orang 100 % 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 %	**5.175.000.000**	

						baik/memenuhi standart Persentase desa yang update data profil desa sesuai aturan Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan / pembinaan pengelolaan Aset desa Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa Persentase peserta yang menindaklanjuti hasil pelatihan perencanaan pembangunan dan keuangan desa Persentase pemerintahan desa yang perencanaan pembangunan terealisasi >80% Persentase pemerintahan desa yang tidak memiliki temuan keuangan dan aset																			

2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desaJumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desajumlah monevJumlah yang terfasilitasi penyusunan RKPDes dan RPJMDes				213 desa2 Dokumen25 Desa213 Dokum	213 desa2 Dokumen 25 Desa en213 Dokum	29,173,000en	27.732.000	27.732.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD ,Perangkat Desa	213 desa2 Dokumen2 5 Desa213 Dokum	200,000,000en	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah peserta penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Monev `				2 Dokumen 213 desa 20 desa	2 Dokumen 213 desa 20 desa	35.930.000	22.830.000	22.830.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- , Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	2 Dokumen 213 desa 20 desa	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan keuangan Desa Membuat Juknis pengelolaan Dana Desa Monitoring dan evaluasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				213 desa 1 juknis 30 desa/kali 2 dokumen	213 desa 1 juknis 30 desa/kali 2 dokumen	325.122.500	320.485.500	320.485.500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	213 desa 1 juknis 30 desa/kali 2 dokumen	650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintahan desa yang mengikuti sosialisasi Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah fasilitasi pembayaran iuran BPJS Perangkat Desa				213 orang 2656 pesert	213 orang 0 Orang a/3o1r8a7 n2g orang	2,713,750,400 /bulan	3.011.969.000	4.466.019.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	213 orang 0 Orang 31872 orang	2,850,000,000 /bulan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				4 Dokume n	1 Dokumen	26.883.000	15.212.000	40.212.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi , Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan agribisnis dan agrowisata berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				15 desa 15 Laporan	17 desa 17 Laporan	145.000.000	358.000.000	358.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	17 desa 17 Laporan	350.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengisian perangkat desanyaJumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat DesaMonev				20 desa20 Laporan 20 desa	20 desa20 Laporan2 0 desa	43.400.000	36.020.000	36.020.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD ,Perangkat Desa	20 desa20 Laporan20 desa	75.000.000	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang di Bimten Profil Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi idm Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun Jumlah monev				213 desa 213 desa 1 Dokume n 35 Dokume	213 desa 213 desa 1 Dokumen 35 Dokume	38,492,000 n	23.215.000	23.215.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	213 desa 213 desa 1 Dokumen 35 Dokume	75,000,000 n	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan aplikasi SIPADES Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Monitoring dan evaluasi perkembangan administrasi aset desa				213 desa 2 Dokumen 10 desa	213 desa 2 Dokumen 10 desa	48.697.500	24.835.000	24.835.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	213 desa 2 Dokumen 10 desa	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti pembinaan/pelatihan manajemen pemerintahan desa Jumlah monev				213 orang 19 Orang	213 orang 19 Orang	53.163.000	27.266.500	27.266.500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	213 orang 19 Orang	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2,01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	jumlah Desa yang menyusun laporan kepala desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek peyusunan laporan kepala desa				15 desa 0 Laporan 15 desa	15 desa 0 Laporan 15 desa	28.234.000	76.875.000	76.875.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	15 desa 0 Laporan 15 desa	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang di Evaluasi Lomba Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten , dan di fasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi Jumlah Peserta Bimtek Evaluasi perkembangan Desa				19 desa 3 Dokumen 1 pemenang 213 desa	19 desa 3 Dokumen 1 pemenang 213 desa	61.897.000	52.155.000	52.155.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , BUMDes , BPD , Perangkat Desa	19 desa 3 Dokumen 1 pemenang 213 desa	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Dengan Kategori baikPersentase RTM yang Memiliki UsahaPersentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat persentase usaha ekonomi desa yang produktif	%%		%%	20 %4.47 %91,96 %100%	20 %4.47 %91,96% 100%	**1.060.000.000**	**1.055.100.000**	**1.070.100.000**				Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		20 %4.47 %94,26%100%	**2.490.000.000**	
2	**13**	**05**	2,01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa (LKD) yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes Jumlah desa yang menindaklanjuti pembentukan lembaga adat desa Jumlah kelembagaan desa (LKD) yang ditata sesuai standar Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (pmdn 18/2021) Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan (LKD) desa yang ditata sesuai standar Persentase Binaan posyantek yang aktif Persentase KPMD yg mengikuti pelatihan perencananan pembangunan partisipatif dan paham diukur dengan nilai 80-100 Persentase PKK Desa yang yang	orang desa Lembag desa admin % % % % % % % % % LPMD	a	orang desa Lembaga desa admin % % % % % % % % % LPMD %	324 orang 10 desa 114 Lembag 8 desa 273 admin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 19 LPMD 100% 3 Desa 100%	324 orang 10 desa a114 Lembag 8 desa 273 admin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 19 LPMD 100%	**1,060,000,000** a	**1.055.100.000**	**1.070.100.000**		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		324 orang 10 desa 114 Lembaga 8 desa 273 admin 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 19 LPMD 100% 5 Desa 100%	**2,490,000,000**	

						menindaklanjuti hasil pelatihan/pembinaan 10 program pokok PKK Persentase Posyandu aktif Persentase RTM Desil 1,2,3 yang menindaklanjuti hasil pembinaan persentase usulan masyarakat yang ditindak lanjuti LKD persentase lembaga yang memiliki hukum adat Jumlah Desa yang memanfaatkan TTG Jumlah RTM yang terkases permodalan																	

						Persentase RT/RW yang mengikuti sosialisasi perencanaan pembangunan partisipatif dan paham diukur dengan nilai 80-100 Persentase usulan dari masyarakat pada kegiatan sambang desa yang ditindaklanjuti Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM																	
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang di fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Desa/LADJumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum AdatJumlah Lembaga Adat Desa yang di binaJumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Lembaga Adat Desajumlah dokumen hasil Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan				1 LAD2 Dokumen2 LAD50 orang2 Dokumen	1 LAD2 Dokumen 2 LAD50 orang2 Dokumen	60.000.000	60.0	60.000.000	60.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , PKK , LAD , LKD ,Pokmas	1 LAD2 Dokumen2 LAD50 orang3 Dokumen	0	90.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah fasilitasi penerimaan honorarium RT/RW Jumlah LKD yang di bina Jumlah LKD yang mengikuti pelatihan Jumlah pokjanal posyandu yang mendapat pembinaan dan pelatihan Jumlah LKD,Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat Yang ditingkatkan				81864 Kali 57 LKD 60 orang 19 Pokjanal/ 1 LKD	81924 Kali 57 LKD 60 orang P1o9syPaonkdjaunal/	25,000,000 Posyandu	20.000.000	20.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , PKK , LAD , LKD , Pokmas	81924 Kali 57 LKD 60 orang 19 Pokjanal/ 2 LKD	400,000,000 Posyandu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang di binaJumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DesaJumlah KPM Penerima manfaat yang di binaJumlah KPM Penerima modal UsahaJumlah KPM yang mengikuti pelatihanJumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Desa30 KPM	3 Desa0 Dokumen 86 KPM86 KPM30 KPM2 Dokumen	15.000.000	20.000.000	35.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi UmumBantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , PKK , LAD , LKD ,Pokmas	3 Desa0 Dokumen8 6 KPM86 KPM30 KPM2 dokumen	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Event Teknologi Tepat Guna yang di ikuti Jumlah Wartek dan Posyantek yang di bina Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna				5 Wartek/po	1 Event k5mWasartek/pok 1 Laporan	mas 10,000,000	55.000.000	55.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , PKK , LAD , LKD , Pokmas	1 Event 5 Wartek/pok 1 Laporan	mas 650,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah event BBGR yang di selenggarakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Sambang desa yang di selenggarakan				2 event 3 Laporan 23 desa	2 event 3 Laporan 19 desa	530.000.000	516.000.000	516.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , PKK , LAD , LKD , Pokmas	2 event 3 Laporan 19 desa	400.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam PenyelenggaraanGerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan KeluargaJumlah Pemenang Jambore PKKJumlah pemenang lomba PKK yang di fasilitasi ke tingkat yang lebih tinggiJumlah Peserta yang mengikutinpelatihan / sosialisasi / pembinaan 10 program pokok PKK				1 Dokumen30 pemenan 1 Pemenang900 orang	1 Dokumen g36 pemenan 1 Pemenang900 orang	g 420,000,000	384.100.000	384.100.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Desa , PKK , LAD , LKD ,Pokmas	1 Dokumen36 pemenan1 Pemenang 900 orang	g 800,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
									TOTAL			**10.475.065.130**	**10.393.305.175**	**11.897.355.175**							**14.660.037.234**	

BAB IV
PENUTUP

Perencanaan yang baik dan terukur adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam arti bahwa kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan pencapaian target pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati/dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) melalui komitmen, konsistensi dan pengawalan yang tinggi serta dokumen ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan proses-proses pembangunan selanjutnya. Selain itu, sikap, mental, semangat, kejujuran, dan disiplin seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) tetap harus dikedepankan.

Dengan adanya dinamika maka Renja Perubahan Perangkat Daerah menjadi penting agar konsistensi dalam mewujudkan sasaran tetap terjamin. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tetap mengacu pada perencanaan sebelumnya dengan mengalami penyesuaian penyesuaian baik dari segi pendanaan maupun kegiatan.Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja maupun Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Tahun 2023 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi maupun anggaran, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah `serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dibawah koordinasi Bappelitbang agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor sehingga dengan adanya keterpaduan diharapkan dapat mempercepat upaya menjawab isue isue yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Apabila Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berakhir, maka diperlukan upaya-upaya perencanaan yang berkelanjutan dan terarah agar rencana kerja dapat terus berjalan dengan baik.Arah kebijakan organisasi tidak terlepas dari kebijakan baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional.Namun satu hal yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatkan kemandirian Desa adalah pondasi dasar yang menjadi rujukan.Untuk itu rencana tindak lanjut yang dilakukan terlepas dari adanya perubahan kebijakan,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus melestarikan program-program dan kegiatan yang bisa mengarahkan secara efektif menuju pada meningkatkan kemandirian desa, terutama di Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO